EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2025

MEDIA JUSTITIA
PT JUSTITIA GLOBAL MANDIRI

MEDIA JUSTITIA

VOL.20

One Stop Legal Information



BERITA DAN LIPUTAN

AKPI MAJU UNTUK INDONESIA: KEPENGURUSAN BARU SIAP UBAH STIGMA TENTANG KEPAILITAN

BERITA DAN LIPUTAN

UNIVERSITAS BOROBUDUR SUKSES GELAR BOROBUDUR UNGGUL GOLF TOURNAMENT 2025

BERITA DAN LIPUTAN

UNIVERSITAS BOROBUDUR MENGIKUTI PERTEMUAN PIMPINAN FAKULTAS HUKUM DUNIA (IALS) DI BANGKOK



TOKOH HUKUM

Prof. Harkristuti
Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.

SCAN ME

DOWNLOAD MAJALAH MEDIA JUSTITIA DIGITAL

EDUKASI HUKUM

HUKUM PIDANA ANAK DALAM PRAKTIK: DIVERSI, REHABILITASI, DAN RESTORASI

SEKAPUR SIRIH



Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai "One Stop Legal Information" merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelummya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui Media Justitia.com dan juga channel Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaikan informasi melalui audio visual dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), Ini Podcast, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai media partner bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan social media seperti website, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut di antaranya adalah Kantor Hukum (Law Firm), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan social media, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatan-kegiatan dalam bentuk audio visual sesuai kebutuhan dan keingingan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui serangkaian proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi One Stop Legal Information bagi para pembacanya.

Salam,

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb.
Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

Content

BERITA DAN LIPUTAN

UNIVERSITAS BOROBUDUR SUKSES GELAR BOROBUDUR UNGGUL GOLF TOURNAMENT 2025 28 SEPTEMBER 2025



SEKAPUR SIRIH 2

DAFTAR ISI 3

MEDIA JUSTITIA HIGHLIGHT 4

Universitas Borobudur Mengikuti Pertemuan Pimpinan Fakultas Hukum Dunia (IALS) di Bangkok 6

OJK Sulawesi Tengah Siapkan SDM Andal dalam Penanganan Pengaduan Konsumen 7

Subjek atau Objek Hukum? Akademisi dan Praktisi Bedah Status AI dalam Diskusi Akademik Universitas Borobudur 8

Universitas Borobudur Sukses Gelar Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 10

AKPI Maju untuk Indonesia: Kepengurusan Baru Siap Ubah Stigma tentang Kepailitan 12

Lulus Sidang Kualifikasi Doktor Ilmu Hukum, Ojak Situmeang Berhasil Mempertahankan Makalah Tentang Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aset Kripto di Indonesia 14

TANYA MEDJUS 15

ADAGIUM HUKUM 16

TOKOH HUKUM 17

JUSTITIA HIGHLIGHT 18



Divhubinter Polri Dorong Penguatan Kapasitas Penyusunan Perjanjian Internasional 20

Pelatihan dan Sertifikasi Mediator: Dari Perkara "Menang" Jadi "Selesai" 21

In House Training Legislative Drafter: Justitia Training Center dan Kementerian BUMN Tingkatkan Kompetensi Pegawai 22

DPN PERADI dan Justitia Dorong Advokat Kuasai Audit Hukum sebagai Instrumen Tata Kelola yang Baik 23

PT PLN Gandeng Hukumonline dan Justitia Training Center Selenggarakan In House Training Auditor Hukum 24

Meningkatkan Nilai Tambah Profesi Advokat, PERADI Jakbar dan Justitia Selenggarakan Sertifikasi Mediator 26

Perkuat Stabilitas Keuangan Nasional, LPS dan Justitia Training Center Gelar In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum 27

Audit Hukum Jadi Pilar Pengawasan, Justitia Dipercaya oleh Kementerian PKP Siapkan Auditor Kompeten 28

Pertama dan Satu-satunya di Indonesia, Justitia Laksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pengelola Perlindungan Data Pribadi 29

Cegah Permasalahan Hukum, OIKN Tingkatkan Kemampuan ASN dalam Penyusunan Kontrak 30

Sinergi Penegakan Hukum Pidana di Sektor Jasa Keuangan Dibahas dalam Pelatihan OJK RI 31

UPCOMING EVENT 32

EDUKASI HUKUM 34

INTERMEZZO 35

PRODUCTION TEAM 36

CALL FOR ARTICLE 37

Media Justitia Highlight



Dorong Pembaruan BW Indonesia, Universitas Borobudur Gelar Bedah Buku Rekonstruksi Hukum Perdata

Mediajustitia.com – Universitas Borobudur menggelar seminar Bedah Hukum "Rekonstruksi Hukum Perdata Kajian Kodifikasi di Belanda, Belgia, dan Tantangan di Indonesia." Kegiatan seminar ini langsung dihadiri oleh Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Dr. Tina Amelia, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen FH dan Pascasarjana Universitas Borobudur, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Borobudur, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. dan Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. sebagai Pembedah Buku. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Keadilan Gedung D Lantai 6 Universitas Borobudur pada Jumat, (10/10/2025).

Selengkapnya di mediajustitia.com



Wisuda Universitas Borobudur 2025: Momentum Melahirkan Generasi Unggul dan Berdaya Saing Global

Mediajustitia.com – Universitas Borobudur Jakarta menggelar Wisuda Tahun Akademik 2024/2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Selasa (14/10/2025). Sebanyak 594 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan resmi dilantik dalam suasana penuh khidmat dan kebanggaan.

Selengkapnya di mediajustitia.com



Seminar Nasional ASIPPER: Prof. Yusril Ihza Mahendra Tekankan Pentingnya Harmonisasi Hukum

Mediajustitia.com – Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan (ASIPPER) berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, sukses menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Membangun Kolaborasi Akademisi dan Praktisi untuk Sistem Perundang-undangan di Indonesia" serta Konferensi Nasional bertema "Perundang-undangan dalam Menjawab Tantangan Teknologi dan Multi Krisis."

Selengkapnya di mediajustitia.com



Kuasa hukum yakini majelis hakim akan bijak dalam mengungkap kebenaran kasus migas Pertamina

Mediajustitia.com – Dakwaan terhadap Mohammad Kerry Adrianto Riza dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) dinilai tidak cermat dan kabur. Tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah ketidaksesuaian dalam surat dakwaan yang membuat substansi perkara menjadi tidak tepat.

Selengkapnya di mediajustitia.com



Pertamina dan Terminal BBM Anak Riza Chalid: Antara Kebutuhan Teknis dan Dugaan Intervensi

Mediajustitia.com – Sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) kembali mencuri perhatian publik. Persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tersebut menghadirkan sejumlah mantan pejabat Pertamina yang memberikan kesaksian penting, salah satunya mengenai keberadaan terminal bahan bakar minyak (BBM) milik anak pengusaha migas ternama, Mochamad Riza Chalid.

Selengkapnya di mediajustitia.com



Lulus Sidang Kualifikasi Doktor Ilmu Hukum, Ojak Situmeang Berhasil Mempertahankan Makalah Tentang Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aset Kripto di Indonesia

Mediajustitia.com – Bertempat di Gedung D Pascasarjana, Universitas Borobudur, Jakarta, Ojak Situmeang yang merupakan Managing Partner di OS Law Partnership sekaligus Bendahara Umum Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI) berhasil mempertahankan makalah kualifikasinya yang berjudul "Konstruksi Hukum dalam Menjamin Perlindungan Hukum terhadap Aktivitas dan Transaksi Aset Kripto di Indonesia yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan."

Selengkapnya di mediajustitia.com

Universitas Borobudur Mengikuti Pertemuan Pimpinan Fakultas Hukum Dunia (IALS) di Bangkok



Mediajustitia.com – Sebagai bentuk pertanggung jawaban akademik dan moral kampus terakreditasi Unggul Universitas Borobudur, Prof Faisal Santiago Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Dr Ahmad Redi Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan Prof Ade Saptomo Senior Advisor Program Pascasarjana Universitas Borobudur menghadiri pertemuan para pimpinan prodi hukum dunia (annual meeting) di Universitas Chulalongkorn University Thailand Bangkok.

Annual Meeting diselenggarakan pada tanggal 8-9 September 2025 di Chulalongkorn University diikuti kurang lebih dari 100 delegasi 75 University dari 35 negara, pertemuan sangat penting bagi Universitas Borobudur yang bergerak menuju Kampus Internasional bereputasi global.

Universitas Borobudur sebagai anggota dari International Association Law Schools (IALS) sejak tahun 2015 pertama kali hadir dan ikut di pertemuan dunia di Madrid dan Segovia Spanyol dan selalu hadir dalam pertemuan para pimpinan pengelola prodi hukum dunia. Di mana saat itu menghasilkan MADRID PROTOCOL on the Principles of Evaluation of Legal Education.

2016 Prof Faisal Santiago juga hadir dalam pertemuan bergengsi akademisi hukum dunia di UC Hastings College of The Law, California Amerika. Dalam pertemuan dunia tersebut bagaimana kolaborasi secara global dalam pengelolaan pendidikan hukum. Delegasi Universitas Borobudur selalu hadir dalam pertemuan akademik dunia hingga sampai saat ini di Bangkok Thailand.
Tema konferensi tahun ini adalah Perspektif Abad ke-21: Seperempat Abad. Kita telah mencapai seperempat abad dan titik krusial di abad ke-21, menjadikan Pertemuan Tahunan IALS ini sebagai platform penting untuk merefleksikan kekuatan transformatif yang memengaruhi sekolah hukum dan profesi hukum di seluruh dunia. Dari kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan globalisasi hingga pergeseran nilai-nilai sosial dan tantangan hukum yang kompleks.

Artificial Intelligence dan Pendidikan hukum menjadi salah satu issue yang di diskusikan dalam pertemuan dunia tersebut, pendidikan hukum harus beradaptasi untuk menguatkan pendidikan hukum dalam proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan global. Beradaptasi dengan kurikulum hukum internasional dan menjadi ciri dan issue akademik internasional yang mengantarkan Prodi S1, S2 dan S3 Ilmu Hukum Universitas Borobudur terakreditasi unggul pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk Perguruan Tinggi Swasta.

Semangat memajukan pendidikan hukum dunia menjadi hal utama tanpa ruang dan batas untuk kemajuan bersama pertukaran dosen dalam bentuk Visiting Professor, student mobility kerap dilakukan oleh Universitas Borobudur.

Pelan tapi pasti pengembangan kurikulum pendidikan dan kerjasama international terus dilakukan oleh Universitas Borobudur dalam kancah pendidikan internasional. Sehingga saat ini semua prodi hukum dan institusinya terakreditasi unggul ujar Prof Faisal yang juga Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur.

Baca berita lainnya di *https://www.mediajustitia.com/berita/*

OJK Sulawesi Tengah Siapkan SDM Andal dalam Penanganan Pengaduan Konsumen



Mediajustitia.com – Palu, 18 Oktober 2025, Otoritas Jasa Keuangan laksanakan Pelatihan Intensif Handling Complain Dan Memfasilitasi Para Pihak bekerjasama dengan Justitia Training Center. Dalam pembukaan pelatihan tersebut, Andriansyah Tiawarman K (Presiden Direktur Justitia Training Center) menyampaikan apresiasi dan ungkapan terimakasih terhadap OJK Sulawesi Tengah yang sudah sangat aware terhadap pelayanan terhadap masyarakat luas.

"Sebagaimana diatur dalam POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK memiliki kewajiban dalam menyediakan Layanan Pengaduan Konsumen yang meliputi penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan. Dalam konteks inilah kemampuan Bapak/Ibu dalam melakukan fasilitasi para pihak dan handling complaint menjadi sangat strategis. Tidak hanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun budaya pelayanan publik yang transparan, empatik, dan solutif," ungkap Andriansyah Tiawarman K dalam kesempatan yang sama.

Dalam kegiatan profesional yang melibatkan multi pihak termasuk juga dalam kerja penanganan konflik, kegiatan memfasilitasi, diskusi serta perundingan merupakan hal yang biasa dilakukan. Agar berjalan tertib, lancar dan terarah pada tujuannya, suatu diskusi dan juga perundingan biasanya dipandu oleh seorang fasilitator. Fasilitator tersebut akan membantu mengawal diskusi agar tetap terarah dengan menjaga kelancaran komunikasi dan memastikan para peserta saling menghormati gagasan dan tertib dalam berdialog. Penggunaan pilihan teknik fasilitasi juga perlu disesuaikan dengan tujuan diskusi itu sendiri. Misalnya jika tujuan diskusi adalah untuk melakukan perencanaan strategis organisasi, mungkin diperlukan seorang fasilitator menggunakan permainan bina-usaha untuk mencairkan suasana di sela-sela sesi diskusi. Sedangkan jika diskusi dilakukan dalam rangka perundingan penyelesaian konflik, biasanya penyepakatan aturan main perundingan menjadi agenda untuk didiskusikan tersendiri oleh para pihak yang difasilitasi oleh seorang mediator.

Dalam kegiatan Pelatihan Intensif Handling Complain Dan Memfasilitasi Para Pihak, terdapat delapan belas peserta yang mengikuti kegiatan ini. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan adalah gabungan dari seluruh unit kerja di OJK Sulawesi Tengah.

"Hal ini merupakan bentuk dan upaya nyata dari OJK Sulawesi Tengah bahwa menjaga palayanan terhadap masyarakat bukan hanya tanggung jawab front liner saja, namun juga tanggung jawab seluruh lapisan pegawai OJK" ujar Bonny Hardi Putra selaku Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah.
Lebih lanjut, Bonny Hardi Putra menuturkan bahwasanya tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kompetensi kepada teman-teman di Kantor OJK Palu terkait bagaimana layaknya menangani complain yang masuk kepada OJK.

"Apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana kita memfasilitasi para pihak agar complain tersebut tidak berlanjut pada sengketa yang lebih dalam" tambahnya.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama satu hari, para peserta akan menerima materi berkenaan dengan :

1. Teknik Handling Complain,
2. Creative Problem Solving,
3. Teknik Memfasiltiasi Para Pihak dalam Mediasi,
4 Dan Simulasi.

"Dengan mengikuti kegiatan ini, saya berharap kualitas pelayanan Kantor OJK Palu dapat meningkatkan pengetahuan para pegawai OJK Kantor Palu untuk mempersiapkan, membentuk dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme dalam menangani pengaduan atas sengketa keuangan yang menjadi salah satu ranah tugas dan fungsi OJK" pungkas Bonny Hardi Putra.

Subjek atau Objek Hukum? Akademisi dan Praktisi Bedah Status AI dalam Diskusi Akademik Universitas Borobudur



Mediajustitia.com – Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyelenggarakan sebuah diskusi akademik bertajuk "Kecerdasan Artifisial (KA): Subjek atau Objek Hukum? Menelaah Status Hukum Kecerdasan Artifisial di Era Revolusi Teknologi" pada Senin, 15 September 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung D Lantai 6, Ruang Keadilan, Universitas Borobudur ini dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga sore hari. Diskusi menghadirkan deretan pakar yang mewakili berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pejabat pemerintah, untuk membedah tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., dalam sambutannya menegaskan urgensi tema yang diangkat. Menurutnya, AI bukan lagi sekadar teknologi eksperimental, melainkan telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari layanan publik hingga industri bisnis.

"Kecerdasan artifisial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hukum harus hadir agar pemanfaatannya tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat," ujarnya.

Salah satu narasumber utama, Dr. M. Muchlas Rowi, S.S., M.H., M.M., dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, menggarisbawahi persoalan etika dan tanggung jawab hukum. Ia mengingatkan bahwa kehadiran AI dapat membawa dampak positif, tetapi juga potensi kerugian.

"Pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah: ketika AI menimbulkan kerugian, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pembuatnya, penggunanya, atau AI itu sendiri?" jelasnya.

Persoalan ini diperkuat dengan pandangan Dr. Said Mirza Pahlevi, M.Eng., selaku Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ia menekankan perlunya regulasi yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, tetapi juga tetap mendorong inovasi.

"Kita harus membuat aturan yang bisa melindungi masyarakat, tapi jangan sampai aturan itu membunuh kreativitas dan inovasi teknologi,"

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

"Kita harus membuat aturan yang bisa melindungi masyarakat, tapi jangan sampai aturan itu membunuh kreativitas dan inovasi teknologi," katanya.

Sementara itu, Direktur KORIKA, Ir. Alexander Ludi, MBA, memfokuskan paparannya pada kebutuhan industri dan riset. Menurutnya, regulasi yang jelas dan kepastian hukum merupakan faktor utama agar riset AI bisa berkembang.
"Industri AI membutuhkan kepastian hukum. Tanpa itu, ekosistem riset akan berjalan di tempat. Kepastian hukum ibarat fondasi untuk mengembangkan teknologi yang aman dan berdaya guna," tegasnya.

Diskusi ini dipandu oleh Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Dalam pengantarnya, ia mengajukan pertanyaan reflektif mengenai status hukum AI.
"Apakah mungkin di masa depan kita harus mengakui AI sebagai 'subjek hukum' yang bisa menggugat dan digugat di pengadilan?" tanyanya. Menurut Dr. Ahmad Redi, perdebatan ini tidak hanya teoretis, tetapi memiliki implikasi praktis yang luas. Jika AI nantinya diberi kedudukan hukum khusus, maka seluruh sistem hukum, mulai dari perdata hingga pidana, harus beradaptasi. Apabila tidak menyiapkan kerangka hukum sejak dini, maka Indonesia bisa tertinggal dalam menghadapi tantangan global.

Dari sisi akademis, Francisca Romana, S.H., M.H., mahasiswa program doktor Universitas Borobudur, menambahkan perspektif penelitian hukum. Ia menekankan pentingnya riset mendalam untuk menjawab persoalan tanggung jawab hukum dalam penggunaan AI.

Francisca mencontohkan, dalam konteks transaksi bisnis maupun pelayanan publik yang menggunakan AI, sangat mungkin terjadi kesalahan sistem atau keputusan yang merugikan.
"Ketika hal itu terjadi, siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Apakah pengembang, pemilik sistem, ataukah AI itu sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini harus jelas dalam sistem hukum kita," tambahnya.

Diskusi semakin mengerucut ketika Dr. Muchlas Rowi menyinggung perkembangan hukum internasional. Ia menyoroti wacana electronic personhood di Uni Eropa, yang memungkinkan AI tertentu diberi kedudukan hukum mirip subjek hukum.

"Uni Eropa mulai membicarakan konsep electronic personhood untuk AI tertentu. Ini menandakan dunia tidak lagi menutup mata terhadap kemungkinan AI memiliki status hukum khusus," jelasnya.

Hal ini ditanggapi oleh Dr. Said Mirza Pahlevi yang menilai bahwa Indonesia harus bersikap proaktif.
"Indonesia tidak bisa menunggu terlalu lama. Regulasi harus disiapkan secara bertahap, sambil belajar dari praktik-praktik terbaik di negara lain," ungkapnya.
Selain itu, aspek etika juga menjadi sorotan penting. Ir. Alexander Ludi menegaskan bahwa hukum tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga harus melindungi nilai kemanusiaan.

Forum diskusi ini juga membuka sesi tanya jawab interaktif. Salah satu pertanyaan yang mencuat adalah kemungkinan AI menjadi pelaku tindak pidana. Menanggapi hal ini, Dr. Ahmad Redi menjelaskan,

"Pertanyaan itu wajar. Namun, dalam hukum kita saat ini, AI masih dipandang sebagai alat. Meski begitu, wacana perubahan tidak bisa dihindari."

Dialog semakin hidup ketika para mahasiswa mengaitkan persoalan AI dengan realitas hukum Indonesia, yang dinilai masih konvensional dan belum siap menghadapi kompleksitas digital. Diskusi pun menghasilkan beragam sudut pandang yang memperkaya pemahaman peserta.

Kegiatan turut didukung oleh Universitas Borobudur, FRH Law Firm, JR Counsellor Attorney at Law, serta Justitia Training Center. Sinergi berbagai pihak ini menunjukkan adanya kepedulian bersama untuk mendorong pembahasan hukum yang lebih komprehensif atas teknologi baru.



Para peserta yang hadir, baik mahasiswa, dosen, maupun praktisi hukum, menyatakan bahwa forum ini sangat membuka wawasan. Mereka melihat bahwa diskusi bukan hanya membahas teori, tetapi juga menawarkan perspektif nyata tentang langkah hukum yang perlu dipersiapkan Indonesia. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Universitas Borobudur meneguhkan dirinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berdampak, serta berkontribusi langsung dalam membangun landasan hukum yang adaptif terhadap era revolusi teknologi. Prof. Faisal Santiago menegaskan komitmen Universitas Borobudur untuk terus menghadirkan forum akademik yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Universitas Borobudur Sukses Gelar Borobudur Unggul Golf Tournament 2025



Mediajustitia.com – Universitas Borobudur melalui Yayasan Pendidikan Borobudur sukses menggelar Borobudur Unggul Golf Tournament 2025, sebuah ajang olahraga bergengsi yang dilaksanakan pada Minggu, 28 September 2025 di Jagorawi Golf & Country Club, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat. Turnamen dimulai pukul 06.30 WIB dan berlangsung hingga selesai.

Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc., dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan menyampaikan harapan agar turnamen ini menjadi ajang silaturahmi, partisipasi, dan kekompakan antar peserta. "Saya berharap ini adalah salah satu bagian dari ajang persaudaraan yang terus berlanjut," ujarnya. Prof. Bambang juga menyampaikan bahwa turnamen ini akan menjadi agenda rutin yang diadakan minimal setahun sekali.

Turnamen ini bertujuan mempererat silaturahmi antar alumni, profesional, serta komunitas pecinta golf, sekaligus menjadi wadah prestasi bagi para peserta. "Semoga Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat hubungan dan kebersamaan," tambahnya.

Prof. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, memberikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini. Menurutnya, acara ini tidak hanya kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana membangun kebersamaan dan jejaring profesional di antara civitas akademika. "Antusiasme peserta sangat tinggi, dan saya berharap turnamen ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya," ujarnya.

Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 merupakan bagian dari komitmen Universitas Borobudur untuk menghadirkan kegiatan inovatif yang menggabungkan olahraga, komunikasi, dan jejaring profesional. Turnamen ini juga membuka peluang kolaborasi dengan mitra bisnis, alumni, dan masyarakat luas.

Baca berita lainnya di *https://www.mediajustitia.com/berita/*



Para peserta merasa senang dapat mengikuti turnamen ini karena selain menyalurkan hobi golf, mereka juga dapat memperluas jaringan dan memperkuat rasa kekeluargaan antaranggota universitas. Panitia berharap turnamen ini akan menjadi agenda tahunan yang dinantikan oleh seluruh civitas akademika dan mitra Universitas Borobudur.

Kategori Juara dan Hadiah Spektakuler
Turnamen ini menyediakan berbagai kategori pemenang yang diperebutkan, antara lain:

* Best Gross Overall
* Best Nett Overall
* Best Nett 1, 2, 3 A
* Best Nett 1, 2, 3 B
* Best Nett 1, 2, 3 Ladies
* Nearest To The Pin
* Nearest To The Line
* Longest Drive

Setelah acara ini, akan dibentuk Borobudur Golf Community (BGC) yang tujuan akhirnya adalah membangun jejaring sesama mahasiswa dan alumni. Dengan adanya komunitas ini, diharapkan hubungan dan kolaborasi antar anggota dapat terus terjaga dan berkembang, tidak hanya di bidang olahraga golf tetapi juga dalam berbagai aspek profesional dan sosial.

Salah satu daya tarik utama adalah hadiah spektakuler Hole in One berupa mobil BAIC BJ40 Plus dan Vespa matic. Selain itu, peserta juga berkesempatan memenangkan hadiah menarik lainnya melalui Lucky Draw, seperti sepeda motor, sepeda listrik, dan perangkat elektronik.

Dengan suksesnya Borobudur Unggul Golf Tournament 2025, Universitas Borobudur menunjukkan komitmen dalam mendorong kegiatan positif yang membangun kebersamaan, prestasi, dan jejaring profesional di lingkungan akademik maupun masyarakat luas.



AKPI Maju untuk Indonesia: Kepengurusan Baru Siap Ubah Stigma tentang Kepailitan



Mediajustitia.com – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) resmi melantik 363 pengurus baru untuk periode 2025–2028 dalam kegiatan yang digelar di Ritz Carlton Jakarta, Senin (6/10). Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru perjalanan AKPI sebagai organisasi profesi yang berperan strategis dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan keadilan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia.

Hadir sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut antara lain Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. (Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan); Todotua Pasaribu, S.T. (Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi); Henry Sulaiman, S.H., M.E. (Direktur Perdata pada Ditjen AHU Kementerian Hukum RI); serta Taufan Eko Nugroho Rotorasiko (Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KADIN Indonesia). Turut hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, PT, perbankan, serta para tokoh senior dan anggota AKPI dari seluruh Indonesia.

Pelantikan kali ini mengusung tema "AKPI Maju untuk Indonesia", yang mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab sosial organisasi dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Ketua Panitia Pelaksana, Riesky Indrawan, S.H., M.H. menjelaskan, tema tersebut juga terinspirasi dari tekad AKPI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan solusi hukum atas tantangan ekonomi. Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting yang menandai komitmen baru AKPI untuk terus relevan dalam menjawab tantangan zaman.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting yang menandai komitmen baru AKPI untuk terus relevan. Kami percaya bahwa kepengurusan AKPI Periode 2025-2028 akan menghadirkan terobosan-terobosan nyata sebagai mitra strategis pembangunan hukum kepailitan di Indonesia," pungkasnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara yang memerlukan persiapan singkat namun intensif.

Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. (Ketua Umum AKPI Periode 2025-2028) menekankan perlunya perubahan paradigma dalam memandang kepailitan. Menurutnya, kepailitan dan PKPU bukanlah akhir dari perjalanan usaha, melainkan jalan keluar (way out) untuk restrukturisasi dan pemulihan ekonomi.

"Kami ingin mengubah cara pandang bahwa kepailitan bukan lonceng kematian bagi dunia usaha, tetapi justru solusi untuk keluar dari krisis. Melalui restrukturisasi dan rekondisi, perusahaan bisa kembali sehat dan produktif," ujarnya.

Dr. Jimmy juga menyampaikan bahwa meskipun pengurus baru belum genap sebulan terbentuk, berbagai langkah konkret telah dilakukan. Di antaranya, audiensi dengan Direktorat Jenderal Pajak, serta keikutsertaan AKPI dalam Konferensi ASEAN tentang Bankrupt and Cross Border Insolvency di Kuala Lumpur, dimana Indonesia melalui AKPI ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan selanjutnya pada tahun 2026 di Bali.

"Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Ketua KADIN Indonesia, Bapak Anindya Bakrie, untuk melaksanakan program edukasi

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

“Kami ingin mengubah cara pandang bahwa kepailitan bukan lonceng kematian bagi dunia usaha, tetapi justru solusi untuk keluar dari krisis. Melalui restrukturisasi dan rekondisi, perusahaan bisa kembali sehat dan produktif,” ujarnya.

Dr. Jimmy juga menyampaikan bahwa meskipun pengurus baru belum genap sebulan terbentuk, berbagai langkah konkret telah dilakukan. Di antaranya, audiensi dengan Direktorat Jenderal Pajak, serta keikutsertaan AKPI dalam Konferensi ASEAN tentang Bankrupt and Cross Border Insolvency di Kuala Lumpur, dimana Indonesia melalui AKPI ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan selanjutnya pada tahun 2026 di Bali.

“Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Ketua KADIN Indonesia, Bapak Anindya Bakrie, untuk melaksanakan program edukasi nasional. Kami akan berkeliling Indonesia memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang UU Kepailitan,” lanjutnya. Kepengurusan AKPI telah mempersiapkan berbagai program baik dari jangka pendek hingga jangka panjang.

Henry Sulaiman, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RI, menyampaikan bahwa pelantikan ini mencerminkan proses demokrasi internal yang sehat dan matang.
“Berbagai perbedaan yang muncul selama proses pemilihan bukanlah tanda perpecahan, tetapi bukti bahwa AKPI adalah organisasi yang terbuka terhadap berbagai pandangan. Kekuatan sejati AKPI terletak pada kemampuannya untuk menyatukan diri dari perbedaan itu,” ujarnya.

Ia berharap pengurus baru dapat memperkuat sinergi antara AKPI dan pemerintah, membangun sistem kepailitan yang transparan, adil, dan berdaya saing, serta meningkatkan kolaborasi lintas organisasi untuk membangun ekosistem kepailitan yang modern dan berwawasan global.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Otto Hasibuan turut menyampaikan apresiasi dan pesan mendalam kepada para pengurus baru



AKPI. Menurutnya, profesi kurator dan pengurus memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan hukum kepailitan yang adil dan berintegritas.

“Tidak semua orang bisa menjadi kurator. Profesi ini menuntut bukan hanya penguasaan hukum, tapi juga integritas dan ketelitian administrasi. Tanpa integritas, tidak ada keadilan. Tanpa keadilan, kepercayaan akan hilang. Dan tanpa kepercayaan, dunia usaha tidak akan bisa berjalan,” tegas Prof. Otto.

Beliau juga mengingatkan pentingnya pendidikan hukum berkelanjutan (continuing legal education) bagi anggota AKPI agar senantiasa siap menghadapi dinamika hukum dan ekonomi yang terus berubah.

Dengan semangat integritas, kebersamaan, dan profesionalisme, AKPI berkomitmen melangkah maju menjadi organisasi yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

“Hari ini bukan akhir, melainkan awal perjalanan baru. Kita mulai dari nol dengan semangat baru, untuk membuktikan bahwa pengurus AKPI 2025–2028 adalah wajah-wajah terbaik yang siap membawa perubahan dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. AKPI Maju untuk Indonesia” pungkas Dr. Jimmy.



Lulus Sidang Kualifikasi Doktor Ilmu Hukum, Ojak Situmeang Berhasil Mempertahankan Makalah Tentang Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aset Kripto di Indonesia



Mediajustitia.com – Palu, 18 Oktober 2025, Otoritas Jasa Keuangan lakBertempat di Gedung D Pascasarjana, Universitas Borobudur, Jakarta, Ojak Situmeang yang merupakan Managing Partner di OS Law Partnership sekaligus Bendahara Umum Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI) berhasil mempertahankan makalah kualifikasinya yang berjudul "Konstruksi Hukum dalam Menjamin Perlindungan Hukum terhadap Aktivitas dan Transaksi Aset Kripto di Indonesia yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan."

Dihadapan tim Penguji yakni Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H.,M.M., Dr. KMS Herman, S.H., M.H., dan Dr. Binsar Jon Vic, S.H., M.H., diketahui Ojak Situmeang, resmi menyelesaikan sidang kualifikasi di Universitas Borobudur, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025). Dalam paparannya, Ojak menekankan pentingnya pembangunan kerangka hukum yang jelas, adaptif, dan berkeadilan untuk menghadapi dinamika pesat perkembangan teknologi finansial dan aset digital di Indonesia khusunya dalam hal ini aset kripto.

"Tercatat pada tahun 2024, Perkembangan transaksi aset kripto di Indonesia meningkat pesat, berdasarkan data yang dihimpun oleh Penulis terdapat pengguna aset kripto sebanyak 22,9juta pengguna dengan nilai volume transaksi sebesar 650 Triliun, merujuk data dan fakta tersebut adalah sangat tepat diperlukannya regulasi yang komprehensif guna mengatur mekanisme perlindungan hukum terhadap pengguna aset kripto dan ditunjang dengan peningkatan literasi keuangan khususnya aset kripto serta perlu adanya lembaga atau badan khusus yang menangani penyelesaian sengketa terkait aset kripto," ujar Ojak Situmeang yang juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Hukum Pajak dan Kepabeanan Indonesia (PKHPKI) pada saat sidang, di Universitas Borobudur, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

Menurutnya, kepastian hukum menjadi kunci utama untuk mendorong inovasi, melindungi masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. "Perlindungan hukum terhadap aktivitas dan transaksi aset kripto tidak boleh lagi bersifat parsial. Diperlukan konstruksi hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak," ujar Ojak Situmeang seusai sidang, di Universitas Borobudur, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

TANYA MEDJUS 01:22

Sobat Justitia

Halo min, saya Fajar, mahasiswa semester akhir di Jakarta. Minggu lalu, saya ikut aksi demonstrasi damai menolak tunjangan DPR dan berbagai permasalahan lain yang dianggap merugikan masyarakat. Awalnya semua berjalan tertib, tapi menjelang malam hari, aparat mulai membubarkan massa dengan gas air mata dan tembakan peluru karet. Teman saya terkena peluru karet, padahal dia tidak melakukan kekerasan atau provokasi apapun. Apakah tindakan aparat yang menyebabkan teman saya terluka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran HAM?

PENGGUNAAN GAS AIR MATA DAN PELURU KARET DALAM PEMBUBARAN AKSI DAMAI: APAKAH MELANGGAR HUKUM?



Hallo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya!
Tindakan aparat kepolisian yang menyebabkan luka terhadap peserta demonstrasi damai, seperti yang dialami oleh teman Anda, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia apabila dilakukan di luar batas kewenangan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang sah. Demonstrasi damai merupakan bentuk ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini juga ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk melalui demonstrasi damai.

Dalam konteks penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dengan tetap menghormati hak-hak warga negara. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengatur secara ketat mengenai perizinan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan senjata api dan peralatan keamanan yang digolongkan sebagai senjata api, termasuk peluru karet. Dalam peraturan tersebut, peluru karet dikategorikan sebagai senjata non-mematikan (less-lethal weapon) yang penggunaannya harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan berdasarkan ancaman nyata terhadap keselamatan publik atau petugas. Dalam Perpol tersebut, gas air mata termasuk peralatan keamanan yang digolongkan sebagai senjata api untuk kepentingan bela diri, sementara senjata api peluru karet merupakan jenis senjata api non organik yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas polsus, PPNS, Satpam, Satpol PP, olahraga, dan beladiri. Penggunaan senjata api peluru karet juga harus memiliki izin dari Kapolri, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan secara sembarangan.

Apabila teman Anda terkena peluru karet dalam situasi demonstrasi damai, tanpa adanya tindakan kekerasan atau provokasi dari dirinya, maka penggunaan kekuatan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum. Dalam hukum pidana nasional, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila dilakukan dengan sengaja dan tanpa dasar hukum yang sah.

Dari perspektif hak asasi manusia internasional, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. ICCPR menegaskan bahwa negara harus menjamin hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan secara legal, proporsional, dan non-diskriminatif. Dokumen internasional "Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials" yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990 juga menegaskan bahwa penggunaan senjata api, termasuk peluru karet, hanya diperbolehkan jika benar-benar diperlukan untuk mencegah ancaman serius terhadap nyawa dan harus diarahkan ke bagian tubuh yang tidak vital. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, terutama jika menyebabkan luka serius terhadap individu yang tidak melakukan tindakan kekerasan.

Berbagai laporan dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan Amnesty International Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam penanganan demonstrasi damai masih menjadi persoalan serius. Laporan-laporan tersebut mencatat adanya pola penggunaan peluru karet dan gas air mata secara tidak proporsional, yang menyebabkan luka serius bahkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, aparat tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur dan prinsip HAM yang berlaku.

Secara hukum, tindakan aparat yang menyebabkan luka terhadap peserta demonstrasi damai dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dari perspektif HAM, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas integritas fisik dan keamanan pribadi, yang dijamin oleh Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam konteks ini, penggunaan peluru karet terhadap individu yang tidak melakukan kekerasan atau provokasi, tanpa dasar ancaman nyata, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan HAM yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan kerangka hukum nasional dan internasional yang berlaku, tindakan aparat yang menyebabkan teman Anda terluka dalam demonstrasi damai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM apabila dilakukan secara tidak proporsional dan tanpa dasar ancaman nyata. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan hak-hak warga negara.

Semoga menjawab ya Sobat Justitia!



Adagium Hukum

UBI SOCIETAS, IBI JUS

Where there is society, there is law

di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

EQUUM ET BONUM EST LEX LEGUM

What is fair and good is the law of laws

Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.

GEEN STRAF ZONDER SCHULD

No Punishment Without Guilt

Tiada hukum tanpa kesalahan.

LEGES BE FORTIOR OMNIA POSSET

Law were made lest the stronger should have unlimited power

Hukum dibuat, jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas.

SALUS POPULI SUPREMA LEX

The good of the people be the supreme law

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara.

Tokoh Hukum



PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., PH.D.

PELOPOR REFORMASI HUKUM PIDANA INDONESIA

Prof. Harkristuti Harkrisnowo lahir di Jakarta pada tahun 1956. Ia menamatkan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), kemudian melanjutkan studi magister di bidang Criminology and Corrections di Sam Houston State University, dan menyelesaikan pendidikan doktoral (Ph.D.) di bidang Criminal Justice di kampus ternama Sam Houston State University, Amerika Serikat. Pada tahun 1991.

PERJALANAN KARIR

Karier akademiknya dimulai di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana beliau dikenal sebagai salah satu pakar hukum pidana dan kriminologi terkemuka di Indonesia. Selain aktif sebagai dosen dan peneliti, Prof. Harkristuti juga menjabat sebagai Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi FH UI.

Dedikasinya dalam reformasi hukum pidana membawanya berperan penting di tingkat nasional. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM, serta terlibat aktif dalam berbagai lembaga internasional yang berfokus pada isu keadilan dan kesetaraan hukum.

Puncak kiprah Prof. Harkristuti dalam dunia hukum Indonesia tercermin melalui perannya sebagai Ketua Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Di bawah kepemimpinannya, proses panjang penyusunan KUHP Nasional yang telah dimulai sejak era 1960-an akhirnya mencapai titik penting. Pada masa kepemimpinannya sebagai Ketua Tim Perumus, pemerintah dan DPR berhasil mengesahkan KUHP Baru pada 2 Januari 2023, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Momen ini menjadi tonggak sejarah dalam sistem hukum Indonesia dan menandai salah satu pencapaian besar dalam reformasi hukum pidana nasional.

KARYA DAN KONTRIBUSI

Prof. Harkristuti aktif menulis dan berbicara mengenai isu-isu hukum pidana, kesetaraan gender, keadilan restoratif, dan hak asasi manusia. Beberapa karyanya menjadi rujukan penting dalam pengembangan kebijakan hukum nasional, seperti:

- **Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan 6 Dasawarsa**
- **Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan**

Selain itu, beliau juga aktif menjadi pembicara dalam berbagai forum hukum internasional, mewakili Indonesia dalam pembahasan isu-isu global terkait kriminalisasi, keadilan, dan perlindungan HAM.

KARAKTER, PRINSIP, DAN NILAI KETELADANAN

Prof. Harkristuti dikenal sebagai sosok yang tegas, berintegritas, dan visioner. Ia berpegang pada prinsip bahwa hukum harus hidup dan berkembang sesuai nilai-nilai bangsa, bukan sekadar meniru sistem asing. Dalam berbagai kesempatan, ia sering menekankan bahwa hukum pidana harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan, moralitas, dan kemanusiaan. Salah satu pernyataannya yang terkenal adalah:

"Tidak ada kepentingan lain selain menyelamatkan demokrasi yang adil dan jujur."

Ketekunan, disiplin, dan dedikasinya menjadikan Prof. Harkristuti sosok panutan dalam dunia hukum akademik maupun praktis di Indonesia.

Sebagai Ketua Tim Perumus KUHP Baru, Prof. Harkristuti telah meninggalkan warisan monumental bagi sistem hukum nasional: lahirnya KUHP Indonesia yang berdaulat, humanis, dan kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui kepemimpinan dan pemikiran progresifnya, ia menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana bukan hanya soal teks undang-undang, tetapi tentang membangun keadilan yang berakar pada budaya dan nilai bangsa sendiri.

Prof. Harkristuti Harkrisnowo akan selalu dikenang sebagai arsitek utama KUHP Nasional Indonesia dan pelopor reformasi hukum pidana yang membawa Indonesia menuju kemandirian hukum sejati.

> "TIDAK ADA KEPENTINGAN LAIN SELAIN MENYELAMATKAN DEMOKRASI YANG ADIL DAN JUJUR"
>
> *Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.*



Justitia Training Center's Highlight

September - Oktober 2025



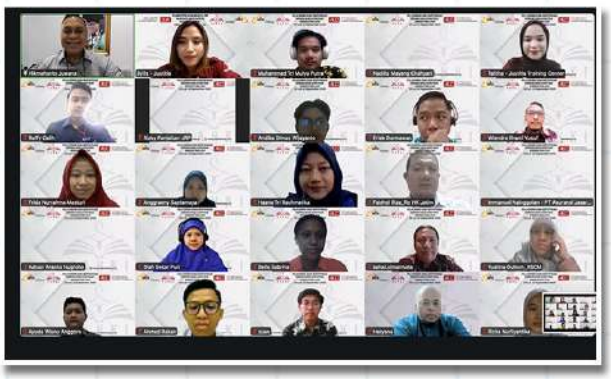
10 September 2025

BPHN: Lebih dari 60.000 Regulasi Tumpang Tindih, Analis Hukum Berkualitas, Profesional, dan Berintegritas Jadi Solusi



10 September 2025

Pembubaran PT Wajib Disertai Likuidasi, Dirjen AHU Tekankan Pentingnya Sertifikasi Likuidator



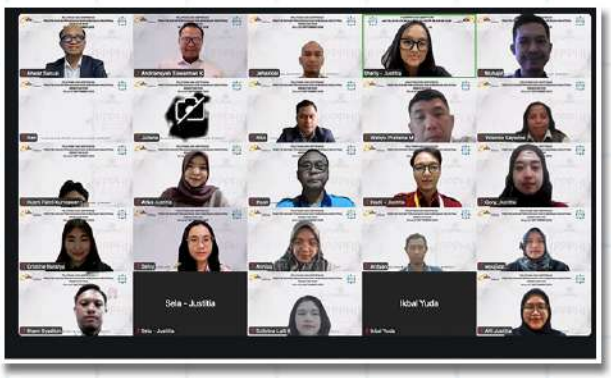
10 September 2025

Justitia Training Center dan PAHKI Gelar Pelatihan serta Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan LXVI untuk Cetak Certified Contract Drafter Profesional



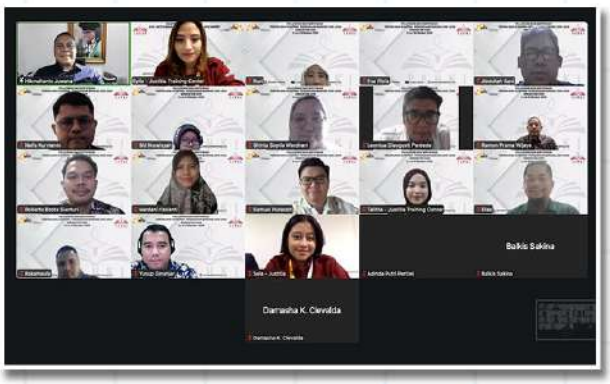
23 September 2025

Pelatihan Mediator Angkatan LVI Justitia Training Center: Bekal untuk Penyelesaian Sengketa Damai, Efisien, dan Bermartabat



24 September 2025

Dari Regulasi hingga Simulasi: Justitia Training Center Bekali Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXXI



01 Oktober 2025

Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa: Siapkan Tenaga Ahli Kompeten



08 Oktober 2025

Tingkatkan Kompetensi Hukum, Justitia Training Center Selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum Angkatan X



15 Oktober 2025

Sertifikasi Perancang Kontrak Jadi Langkah Penting Menuju Pengakuan Profesional Hukum Nasional



15 Oktober 2025

Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Siapkan Peserta Beracara di Pengadilan



21 Oktober 2025

Membangun Kompetensi Praktisi Arbitrase: Justitia Training Center Laksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Arbitrase Angkatan II



22 Oktober 2025

Pelatihan Hukum Pertambangan Justitia-PERKHAPPI Angkatan XLII Fokus pada Kompetensi Profesional



29 Oktober 2025

Tingkatkan Kompetensi Profesional, Justitia Training Center Selenggarakan Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan Angkatan XVII



29 Oktober 2025

Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Likuidator Angkatan III, Justitia Siapkan SDM Profesional di Bidang Likuidasi

Find out more about our activity on instagram @justitia_training

IN HOUSE TRAINING

SEPTEMBER

01 September 2025

Divhubinter Polri Dorong Penguatan Kapasitas Penyusunan Perjanjian Internasional



Mediajustitia.com – Bersama Perkumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI), Justitia Training Center bekerjasama dengan Biro Kerjasama Internasional (Divhubinter) Polri menggelar In House Training Legal Drafting pada 1–4 September 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 15 peserta yang merupakan anggota dari Divhubinter POLRI.

Kegiatan diawali dengan sambutan Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Divhubinter atas kepercayaan yang diberikan. "Alhamdulillah, sejak tahun 2016 kami konsisten untuk menghadirkan pelatihan hukum di Indonesia. Tahun 2024 lalu, kami telah melatih dan mensertifikasi 4.239 peserta dari berbagai institusi. Hari ini kami pun dipercaya untuk mendampingi Divhubinter Polri," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran dan kompetensi Divhubinter dalam hubungan internasional Polri, yang mana produk hukumnya tidak hanya sekadar dokumen administratif namun juga berdampak pada diplomasi antarnegara.

"Ibaratnya seperti SIM, tanpa sertifikat kita belum punya legitimasi, meski sudah punya pengalaman. Dengan sertifikasi ini, apabila dinyatakan kompeten dalam uji sertifikasi terlisensi BNSP, kemampuan Bapak-Ibu diakui secara resmi di Indonesia, Asia Tenggara, hingga Australia" jelasnya.

Sambutan dan pembukaan disampaikan oleh Kombes Pol. Ferly Rosa Putra, Kepala Bagian Perjanjian Internasional Divhubinter Polri. Ia mengakui masih ada tantangan dalam penyusunan dokumen kerja sama internasional. "Proses pembuatan MoU bagi kami masih menjadi tantangan. Seringkali kita langsung ke tahap perumusan MoU. Padahal yang paling krusial justru penjajakan, bagaimana pentingnya MoU itu dibuat dan memenuhi asas resiprokal," ujarnya.

Kombes Pol. Ferly juga menekankan bahwa pelatihan ini diharapkan memberi manfaat besar. Terutama bagi para anggota yang akan bertugas menjadi Atase Kepolisian, diharapkan memiliki bekal untuk menyusun dan mengimplementasikan MoU yang sudah ada.

"Terima kasih kepada Justitia Training Center dan seluruh panitia. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi peningkatan kompetensi SDM Divhubinter Polri," tandasnya. Adapun pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, antara lain perwakilan dari Kementerian Luar Negeri; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.; Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.Mgt.; Aloysius Selwas Taborat, S.H., LL.M.; Ilman Fauzi Rakhmat, S.H., FCIArb.; Marcia Wibisono, S.H., M.H., LL.M.; dan Windri Marieta, S.H., FCIArb.

Pada hari terakhir kegiatan, para peserta melakukan Uji Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Indonesia. Kemudian peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP)



Pelatihan dan Sertifikasi Mediator: Dari Perkara "Menang" Jadi "Selesai"



Mediajustitia.com – Universitas Jambi menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator yang diikuti oleh jajaran rektorat, dekan, dan para dosen Fakultas Hukum. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama dengan Justitia Training Center selaku lembaga pelatihan yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung RI dan terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam sambutannya, Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. (Hakim Asisten Koordinator Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Ri) yang mewakili Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. (Presiden Direktur Justitia Training Center) menegaskan pentingnya peran mediator dalam sistem hukum Indonesia.

"Beban hakim semakin berat. Dalam satu hari minggu bisa lebih dari 200 berkas yang saya baca. Maka dari itu, Mahkamah Agung mendorong penguatan mediator bersertifikat agar penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan jalur damai," jelas Ismu.Lebih lanjut, beliau menekankan perlunya perubahan mindset para mahasiswa hukum dan masyarakat luas. "Jika dulu semangatnya adalah 'menang' perkara, sekarang harus bergeser menjadi 'menyelesaikan' perkara, sehingga bagi mahasiswa yang sebelumnya hanya berfokus untuk menjadi pengacara, hakim, jaksa, polisi, memiliki opsi lain sebagai spesialisasi, yakni sebagai mediator," pungkasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Jambi, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. dalam sambutan sekaligus pembukaan acara menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini.

"Kami berterima kasih kepada Justitia Training Center dan Mahkamah Agung, serta tim pelaksana. Program ini sudah lama kami rencanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dosen, salah satunya melalui sertifikasi mediator. Ke depan, kami juga mendukung pembentukan lembaga pelatihan di lingkungan Fakultas Hukum, sejajar dengan program profesi advokat yang sudah berjalan," jelasnya.

Prof. Helmi juga menekankan bahwa Universitas Jambi ingin melahirkan para mediator yang berkompeten, sehingga keilmuan dan praktik hukum di Universitas Jambi semakin memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Diselenggarakan secara luring di Universitas Jambi pada 1 s.d. 5 September 2025, Justitia Training Center menghadirkan para narasumber yang merupakan para ahli baik dari jajaran Mahkamah Agung, akademisi, dan juga praktisi, antara lain Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.,M., Ph.D. Ismu Bahaiduri, S.H., M.H.; Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H.; Wiwiek Awiati, S.H., M.H. Selama 40 jam pelajaran, para peserta akan diberikan pembekalan materi secara teoritis dan juga praktis dengan kegiatan simulasi. Kegiatan ditutup dengan uji sertifikasi terakreditasi Mahkamah Agung dan uji sertifikasi terlisensi BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia.

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi Universitas Jambi dalam memperkuat kontribusinya terhadap pembaruan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memperluas akses penyelesaian sengketa melalui mediasi.

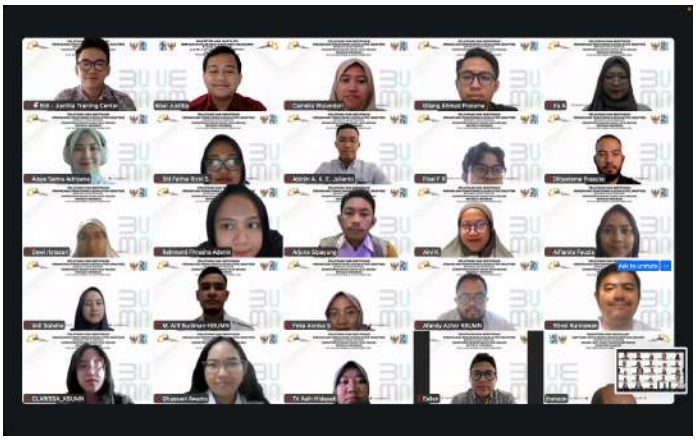


IN HOUSE TRAINING

SEPTEMBER

01 September 2025

In House Training Legislative Drafter: Justitia Training Center dan Kementerian BUMN Tingkatkan Kompetensi Pegawai



Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Peraturan (Legislative Drafter) bekerja sama dengan Kementerian BUMN. Kegiatan ini berlangsung pada 1–4 September 2025 dan dilanjutkan pada 8 September 2025.

Pelatihan yang diikuti oleh 24 peserta ini dilaksanakan secara daring dan khusus diperuntukkan bagi pegawai BUMN. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun peraturan perundang-undangan sesuai standar hukum yang berlaku.

Selama dua hari pelatihan, peserta dibimbing oleh narasumber ahli yang berpengalaman di bidang perancangan peraturan. Nama-nama besar seperti Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. turut hadir memberikan materi.

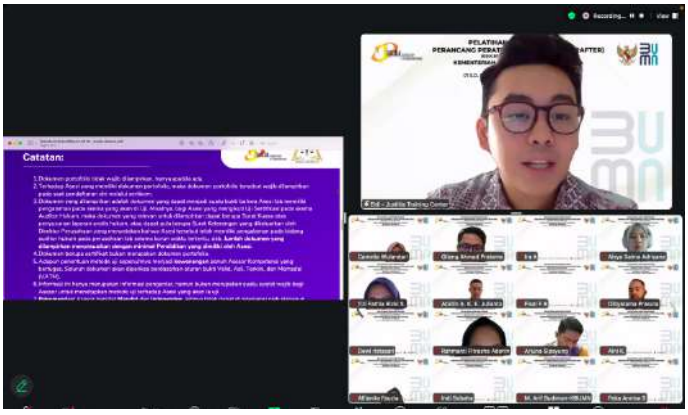
Selain itu, hadir pula narasumber lainnya yakni Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H., Efraim Jodi Kastanya, S.H., M.H., Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum., serta Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H.

Para narasumber tersebut membawakan materi mengenai teknik perancangan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip penyusunan regulasi yang baik, serta memberikan wawasan praktis mengenai dinamika legislasi di Indonesia.

Tidak hanya teori, pelatihan ini juga menghadirkan sesi simulasi penyusunan rancangan peraturan. Melalui simulasi ini, peserta dapat mempraktikkan langsung keterampilan yang diperoleh dan memahami tantangan nyata dalam proses perancangan. Kegiatan ini menjadi sarana pembekalan penting bagi para pegawai BUMN. Mengingat peraturan internal maupun eksternal memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik, keterampilan dalam legislative drafting sangat dibutuhkan.

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan formal, tetapi juga efektif, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan praktis di lingkungan BUMN.

Lebih jauh, sertifikasi yang diperoleh dari pelatihan ini juga diakui secara resmi, sehingga menambah legitimasi kompetensi peserta di bidang perancangan peraturan. Hal ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan karier mereka di dunia profesional. Melalui kerja sama ini, Justitia Training Center dan Kementerian BUMN menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang hukum dan regulasi.



IN HOUSE TRAINING

OKTOBER

29 Oktober 2025

DPN PERADI dan Justitia Dorong Advokat Kuasai Audit Hukum sebagai Instrumen Tata Kelola yang Baik



Mediajustitia.com – Semangat peningkatan kompetensi bagi para praktisi hukum terus digaungkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI). Melalui kerjasama dengan Justitia Training Center, Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPN PERADI menghadirkan program Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum Angkatan II.

Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb. menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menghadirkan program pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan dinamika profesi advokat di era modern.

"Kegiatan ini kami rancang secara komprehensif dengan menggabungkan teori, studi kasus, hingga simulasi praktik audit hukum agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga siap menerapkannya di lapangan," ujarnya. Ia menambahkan, audit hukum tidak hanya berfungsi menilai kesesuaian kegiatan terhadap peraturan, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan atas integritas dan manajemen risiko hukum di berbagai sektor, termasuk korporasi dan lembaga publik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPN PERADI, Bapak Happy SP Sihombing, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguasaan keterampilan audit hukum menjadi bekal penting bagi praktisi hukum masa kini. "Audit hukum adalah kegiatan yang melibatkan identifikasi, pemeriksaan, analisis, penilaian, dan pemberian opini hukum terhadap suatu entitas atau perbuatan hukum. Profesi auditor hukum memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik," ungkapnya.

Happy menegaskan bahwa kesalahan dalam praktik audit hukum dapat menimbulkan konsekuensi serius, sehingga pelatihan ini diharapkan mampu mempersiapkan peserta menjadi auditor hukum yang profesional dan berintegritas. Terselenggara pada 29 Oktober s.d. 2 November 2025 secara daring, para peserta juga akan mengikuti uji sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Indonesia, lembaga berlisensi BNSP. Sebagai pengantar rangkaian materi pembelajaran, Rahendro Jati, S.H., M.Si (Kepala Pusat Pemantauan Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia) turut memberikan paparan singkat bertajuk "Kebijakan Audit Hukum dalam Sistem Pembinaan Hukum Nasional."

Dalam paparannya dijelaskan bahwa pembinaan hukum tidak semata-mata berorientasi administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kepercayaan publik. Mengutip pandangan Prof. Hamid Attamimi, Rahendro menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan alat yang ampuh untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.

"Dengan demikian berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), yang mengandung kekuatan untuk membentuk perilaku dan tata kelola masyarakat. Konsep social engineering inilah yang menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan, tetapi juga proaktif dalam membentuk arah perkembangan masyarakat," lanjutnya.

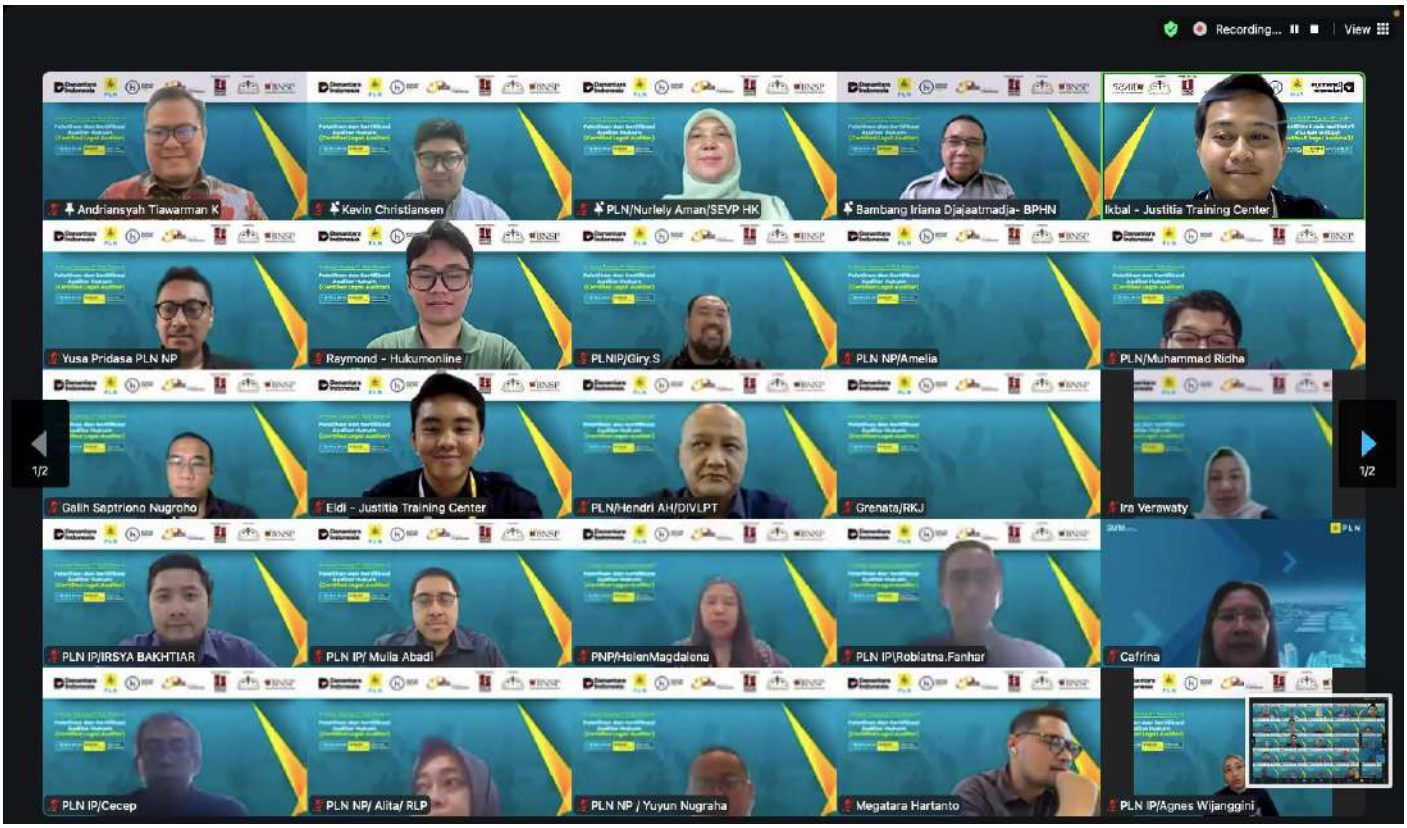
Dalam konteks tersebut, audit hukum dinilai sebagai instrumen penting untuk menjembatani antara aturan tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Audit hukum tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik (good governance) yang berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik dan keberlanjutan sistem hukum nasional.

Kolaborasi antara DPN PERADI dan Justitia Training Center ini menjadi bukti konsistensi dunia advokat dalam memperkuat kapasitas profesi hukum di Indonesia. Melalui sertifikasi kompetensi, para peserta tidak hanya memperoleh pengakuan formal, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan nilai tambah di mata publik serta institusi hukum.

IN HOUSE TRAINING

SEPTEMBER
16 September 2025

PT PLN Gandeng Hukumonline dan Justitia Training Center Selenggarakan In House Training Auditor Hukum



Mediajustitia.com – Kolaborasi antara Hukumonline dan Justitia Training Center, menghadirkan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum bagi PT PLN (Persero) pada 16 s.d. 18 September 2025 dan 23 s.d.24 September 2025, dengan di ikuti oleh 27 peserta.

Dalam sambutannya, Kevin Christiansen David, S.H. selaku Learning Manager Hukumonline menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program ini sebagai bentuk nyata komitmen PLN dalam meningkatkan kompetensi pegawai di bidang hukum. Menurutnya, sebagai perusahaan besar yang menghadapi tantangan bisnis yang kompleks, kepatuhan hukum menjadi kunci utama keberlanjutan.

"Urgensi kemampuan tim hukum dalam mengelola risiko semakin besar dan menjadi kunci utama. Kemampuan audit hukum sangat penting agar bisnis PLN dapat berjalan sesuai koridor hukum. Melalui in-house training ini, Bapak/Ibu akan memperoleh materi-materi esensial yang membantu memperdalam kompetensi sekaligus mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari," ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb. , menekankan bahwa sebagai BUMN strategis, PLN berhadapan langsung dengan dinamika hukum dan bisnis yang terus berkembang. Setiap perjanjian bisnis, kontrak kerja sama, hingga pengadaan barang dan jasa membutuhkan jaminan kepastian hukum agar langkah perusahaan terjamin secara legal dan minim risiko.

"Di sinilah peran auditor hukum menjadi krusial. Mereka tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga memastikan aktivitas dan kebijakan

perusahaan berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik," jelasnya.



Ia juga menggarisbawahi pentingnya sertifikasi profesi sebagai pengakuan kompetensi, sebagaimana penumpang akan lebih tenang apabila pengemudi memiliki SIM resmi, begitu juga auditor hukum yang kompetensinya harus dibuktikan melalui sertifikasi agar kredibilitasnya diakui secara nasional maupun internasional.

Sementara itu, Dr. Nurlely Aman S.H., M.Kn. selaku Senior Executive Vice President (SEVP) Hukum dan Kebijakan PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa inisiatif penyelenggaraan pelatihan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan internal perusahaan untuk meningkatkan kapasitas tim hukum. Menurutnya, seiring perkembangan bisnis yang semakin cepat dan kompleks, dibutuhkan mekanisme yang terverifikasi secara independen agar setiap pendapat hukum dan aktivitas perusahaan memiliki dasar yang kuat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa pendapat hukum maupun aktivitas di internal PLN tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga sesuai mekanisme yang tepat. Pelatihan dan sertifikasi ini akan memberikan keyakinan tambahan, sekaligus memperkuat kompetensi pegawai hukum PLN dalam mendukung kinerja perusahaan," ungkapnya. Nurlely menyampaikan bahwasanya sertifikasi kompetensi atas auditor hukum ditargetkan dapat dilaksanakan kepada seluruh lini hukum di PT PLN (Persero), sehingga berharap kolaborasi berkelanjutan dengan Hukumonline dan Justitia Training Center dapat terlaksana. Rangkaian kegiatan pembuka menjadi semakin bermakna dengan keynote speech dari Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M. (Analis Hukum Ahli Utama BPHN) yang mewakili Min Usihen, S.H., M.H. (Kepala BPHN). Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa profesi auditor hukum merupakan profesi yang sedang tumbuh dan semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha maupun pemerintahan.

"Peran auditor hukum tidak hanya memberi kepastian, tetapi juga membantu organisasi mengelola risiko. Meski saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur auditor hukum, fondasi normatifnya sudah tersedia dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Akuntan Publik, hingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor tentang pengawasan praktik hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala BPHN menekankan pentingnya pembinaan profesi. Menurutnya, profesi auditor hukum hanya akan memperoleh pengakuan bila didukung oleh standar kompetensi yang jelas, kode etik, serta organisasi yang dapat melakukan pengawasan dan pembinaan.

"Profesi auditor hukum memiliki posisi strategis dalam mendukung tata kelola perusahaan dan memastikan kepatuhan hukum. Karena itu, pelatihan ini merupakan langkah awal agar profesi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan tumbuh dengan acuan yang jelas. Jangan melihatnya sebagai hambatan, tetapi peluang emas untuk menunjukkan bahwa profesi ini benar-benar dibutuhkan," pungkasnya.

Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum ini akan berlangsung selama beberapa hari dengan rangkaian materi, simulasi, dan uji sertifikasi profesi. Uji sertifikasi ini mengukur tiga aspek utama, yakni skill, knowledge, dan attitude yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Indonesia terlisensi BNSP. Diharapkan, kegiatan ini dapat melahirkan auditor hukum yang kompeten, berintegritas, serta siap mendukung PLN dalam menghadapi dinamika hukum dan bisnis yang semakin kompleks.



IN HOUSE TRAINING

SEPTEMBER
17 September 2025

Meningkatkan Nilai Tambah Profesi Advokat, PERADI Jakbar dan Justitia Selenggarakan Sertifikasi Mediator

Mediajustitia.com – Justitia Training Center dipercaya menjadi mitra strategis DPC PERADI Jakarta Barat dalam menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator. Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Zahra Kamila, S.S., S.H., M.H. selaku PIC kegiatan, kegiatan akan digelar selama lima hari, pada 17–21 September 2025 ini dengan diikuti oleh 21 peserta dan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

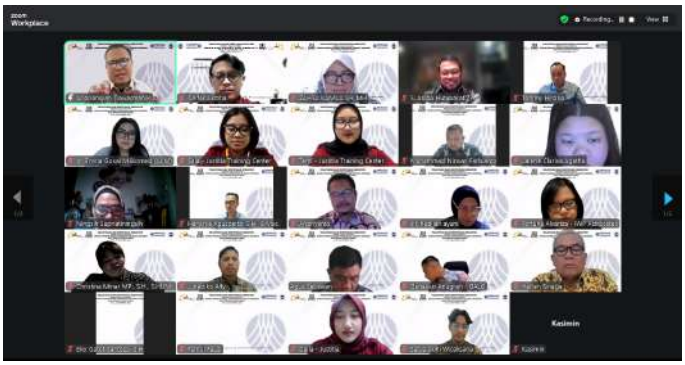
Zahra juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber, panitia, dan peserta atas dukungan yang diberikan.
"Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk mediator ke depannya," tambahnya.

Menyambut baik ajakan kolaborasi DPC PERADI Jakarta Barat, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., mengawali sambutannya dengan ungkapan terima kasih, senang dan bangga atas inisiasi DPC PERADI Jakarta Barat. Andriansyah juga menegaskan bahwa keterampilan mediasi merupakan nilai tambah bagi advokat.

"Sebagaimana kita ketahui, dalam praktik hukum seringkali sengketa tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Di sinilah mediasi berperan penting sebagai mekanisme win-win solution yang tidak hanya mengakhiri perselisihan, tetapi juga menjaga hubungan baik antar pihak," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PERADI Jakarta Barat, Dr. Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H., menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama antara Justitia dan DPC PERADI Jakarta Barat.

Sebagai salah satu DPC yang aktif menyelenggarakan kegiatan, Dr. Suhendra memandang program pelatihan sebagai upgrade skills merupakan bentuk pengembalian pelayanan kepada anggota. "Mediasi sangat penting untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan memuaskan para pihak. Mediator tidak hanya hakim, tetapi juga mediator non-hakim yang memiliki sertifikasi. Harapannya bisa lahir mediator yang memiliki keterampilan dan pemahaman mendalam agar dapat menerapkan mediasi sebagai implementasi asas peradilan cepat, sederhana, berbiaya ringan" tegas Suhendra.



Suhendra berpesan kepada peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, dengan aktif bertanya, berdiskusi dan berlatih agar dapat berkontribusi positif dalam pengembangan penyelesaian sengketa di masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SK KMA No. 106 Tahun 2019. Selama 40 jam pelajaran para peserta akan mendapatkan pembekalan materi dari para trainer terlisensi baik secara teori maupun praktik simulasi. Justitia Training Center merupakan satu-satunya lembaga terakreditasi Mahkamah Agung yang juga bisa menyelenggarakan uji sertifikasi terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Setelah empat hari pelatihan, para peserta akan menjalani uji sertifikasi pada hari terakhir. Uji sertifikasi terlisensi BNSP akan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia. Dengan demikian, peserta yang lulus tidak hanya memperoleh sertifikat mediator, namun juga mendapat pengakuan resmi yang diakui secara nasional dan internasional.

Diketahui, sejak tahun 2018 Justitia telah aktif membangun ekosistem penyelesaian sengketa alternatif dengan menggandeng mitra nasional maupun internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, peran mediator non-hakim semakin mendapatkan pengakuan publik di Indonesia, dimana alumni pelatihan mediator Justitia turut berkontribusi nyata sebagai inisiator Program Mediator Non-Hakim Pro Bono yang telah berjalan di seluruh Pengadilan Negeri di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Kegiatan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi cabang-cabang PERADI lainnya untuk ikut serta dalam menghadirkan program pengembangan kompetensi yang berstandar nasional maupun internasional.

IN HOUSE TRAINING

SEPTEMBER
17 September 2025

Perkuat Stabilitas Keuangan Nasional, LPS dan Justitia Training Center Gelar In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi



Mediajustitia.com – Justitia Training Center dipercaya menjadi mitra dalam penyelenggaraan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi. Kali ini, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berlangsung pada 24 s.d. 26 September 2025 di Hotel Tentrem Jakarta, pelatihan diikuti oleh staf serta jajaran petinggi LPS. Kegiatan dirancang untuk memberikan pembekalan komprehensif mengenai hukum asuransi sekaligus memastikan para peserta memiliki kompetensi yang sesuai standar profesi melalui proses sertifikasi.

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb. menyampaikan rasa apresiasi kepada LPS karena telah mempercayakan penyelenggaraan kegiatan kepada Justitia Training Center.

“Program ini kami hadirkan sebagai jawaban atas kompleksitas tantangan di sektor jasa keuangan. Konsultan hukum asuransi yang mumpuni dan tersertifikasi kini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi,” ungkapnya.

Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti sesi simulasi dan uji sertifikasi yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Indonesia. Justitia dan LSP Hukum Indonesia tercatat sebagai satu-satunya lembaga yang memegang lisensi BNSP untuk skema konsultan hukum asuransi.

Para peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari sejumlah narasumber yang merupakan pakar hukum asuransi. Di antaranya adalah Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.Mgt.; Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.; Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb.; Ojak Situmeang, S.H., M.H., CLA., CTLC., CPCLE., C.Med.; serta Tri Legono Yamuarachmadi, S.H.

Keterlibatan para pakar ini menjadikan pelatihan lebih aplikatif. Peserta tidak hanya dibekali dengan teori, tetapi juga diperkenalkan pada kasus nyata yang sering muncul dalam praktik hukum asuransi. Dengan demikian, materi yang diterima dapat langsung diimplementasikan dalam tugas sehari-hari.

Justitia meyakini bahwa kolaborasi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan, baik bagi peserta maupun bagi LPS sebagai lembaga strategis yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Lebih lanjut, diharapkan sinergi antara Justitia dan LPS dapat berlanjut pada kegiatan-kegiatan lainnya. Sebagai bentuk komitmen Justitia daam menghadirkan program-program berbasis kebutuhan nyata.

IN HOUSE TRAINING

OKTOBER
13 Oktober 2025

Audit Hukum Jadi Pilar Pengawasan, Justitia Dipercaya oleh Kementerian PKP Siapkan Auditor Kompeten



Mediajustitia.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP) bekerja sama dengan Justitia Training Center menggelar kegiatan In House Training dan Sertifikasi Auditor Hukum. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H., didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Dian Fris Nalle, S.H., M.H., serta dihadiri oleh jajaran pimpinan Itjen Kementerian PKP dan tim dari Justitia Training Center.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med., CLA., C.Med., CLi., ACIArb. menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan Kementerian PKP yang menggandeng Justitia dalam program pengembangan kapasitas SDM di bidang hukum.

"Kami memahami bahwa bagi Bapak dan Ibu sekalian, audit hukum bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Namun melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan pendalaman terhadap konsep dan metodologi audit hukum yang kini menjadi instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko hukum," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan pelatihan ini tidak hanya memberikan pembekalan teori, tetapi juga disertai sesi simulasi dan uji sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Indonesia berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Para peserta akan diuji dalam tiga dimensi kompetensi: knowledge, skill, dan attitude.

"Sertifikasi ini bukan sekadar simbol, tetapi bukti pengakuan atas keahlian profesional yang diakui secara nasional bahkan di lingkup Asia Pasifik," tambahnya. Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, Dian Fris Nalle, S.H., M.H. menjelaskan bahwa pelatihan ini memiliki empat tujuan utama:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2. Membekali auditor dengan pengetahuan dan keterampilan teknis di bidang audit hukum;
3. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang;
4. Mendorong terbentuknya ekosistem pengawasan berbasis integritas dan kepatuhan hukum.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat peran auditor hukum dalam setiap lini pengawasan di lingkungan kementerian.

"Profesi audit tentu mempumpuni dalam lakukan audit internal, namun perlu dibekali dengan yang namanya ilmu-ilmu terkait dengan bagaimana menganalisis masalah-masalah hukum, melakukan inventarisasi, dan juga analisa. Oleh karena itu kita bekali agar memberikan peningkatan kompetensi bagi seluruh aparan di kementerian," ujarnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan Justitia Training Center bukan kali pertama dilakukan. Lembaga ini, menurutnya, telah terbukti berpengalaman dan didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten serta pembina akademis terkemuka, Prof. Hikmahanto Juwana. "Kegiatan ini akan menambah profesionalisme. Kompetensi auditor harus menjadikan kita lebih profesional. Pelatihan ini bukan sekadar formalitas, tapi bekal kompetensi nyata berbasis BNSP," pesannya.

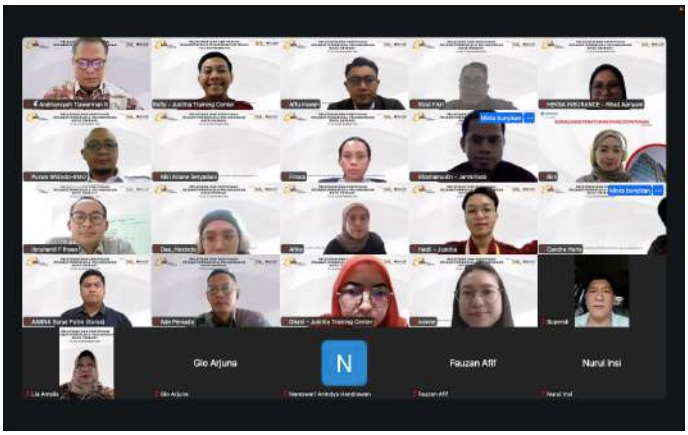
Kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini akan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 13 s.d. 17 Oktober 2025, di Badan Diklat Kejaksaan RI Jakarta Selatan. Selama kegiatan, para peserta akan mendapatkan materi dari para pengajar berpengalaman dan praktisi hukum yang telah tersertifikasi BNSP.

Menutup sambutannya, Presiden Direktur Justitia menegaskan kembali komitmen Justitia Training Center untuk terus berperan aktif dalam pengembangan kapasitas SDM hukum di Indonesia.

"Kami percaya, dengan meningkatnya kompetensi auditor hukum di lingkungan Kementerian PKP, maka proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga pengawasan internal akan semakin kuat dari sisi legalitas dan mitigasi risiko. Pada akhirnya, ini akan mendukung misi besar pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat," pungkasnya.



Pertama dan Satu-satunya di Indonesia, Justitia Laksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pengelola Perlindungan Data Pribadi



Mediajustitia.com – JJustitia Training Center kembali menghadirkan program unggulan dengan menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pengelola Perlindungan Data Pribadi yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, pada 17–21 September 2025, dan diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari berbagai instansi maupun perorangan.

Pelatihan ini merupakan program terbaru Justitia Training Center dalam menjawab kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perlindungan data pribadi. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi untuk mengikuti kegiatan yang dirancang berbasis kompetensi ini, mulai dari penyampaian materi, simulasi praktik, hingga uji sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pelatihan ini di tengah transformasi digital.

"Pandemi telah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari layanan publik, transaksi bisnis, hingga aktivitas sehari-hari masyarakat. Dalam ekosistem digital yang semakin kompleks dan saling terhubung, data pribadi kini menjadi aset yang sangat berharga sekaligus titik rawan dalam tata kelola informasi," ujarnya. Lebih lanjut, Andriansyah menekankan bahwa peran pejabat atau pengelola perlindungan data pribadi sangat vital dalam memastikan kepatuhan hukum dan etika.

"Keberhasilan perlindungan data pribadi sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, serta kapasitas teknis para Data Protection Officer. Mereka adalah garda terdepan yang memastikan setiap pemrosesan data berjalan sesuai hukum, etis, dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas," jelasnya.

Ia juga menegaskan keunggulan program ini sebagai pionir di Indonesia, yakni sebagai satu-satunya kegiatan yang tidak hanya berhenti pada pelatihan namun juga dilengkapi uji sertifikasi terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). "Kami berharap melalui pelatihan ini akan lahir para Certified Data Protection Officer yang mampu memperkuat penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di berbagai sektor, serta mendorong terciptanya ekosistem perlindungan data pribadi yang lebih akuntabel dan terpercaya di Indonesia," tutup Andriansyah.

Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya Kementerian Hukum Republik Indonesia; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., PhD.; Prof. Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M.; Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.; Josua Sitompul, S.H., LL.M., Ph.D.; Tuaman Manurung, S.H., M.H.; Melia Prabangasta Yustisia, S.H., M.H.; Harzy Randhani Irdham, S.H., LL.M., CIPP/E, CIPM, CIPT, FIP.; Eryk Budi Pratama, M.Kom., CIPM, CIPP/E, FIP.

Setelah mendapat pembekalan materi selama 4 hari, para peserta akan mengikuti uji sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Profesi Sertifikasi (BNSP).

IN HOUSE TRAINING

OKTOBER
28 Oktober 2025

Cegah Permasalahan Hukum, OIKN Tingkatkan Kemampuan ASN dalam Penyusunan Kontrak



Mediajustitia.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ROtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerja sama dengan Justitia Training Center menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai dalam penyusunan, penilaian, serta pengelolaan kontrak yang profesional dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada OIKN atas kepercayaannya untuk menjadi mitra penyelenggara kegiatan peningkatan kompetensi tersebut.

"Kepercayaan ini merupakan kehormatan bagi kami untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan OIKN, yang memegang peranan strategis dalam pembangunan dan tata kelola Ibu Kota Negara baru Indonesia," ujar perwakilan Justitia Training Center.
Ia juga menekankan bahwa perancangan kontrak bukan semata ranah hukum, melainkan kebutuhan lintas sektor yang menyentuh berbagai aspek kerja sama, investasi, dan pengadaan.

"Sering kali permasalahan hukum bukan disebabkan oleh itikad buruk, tetapi oleh kelemahan dalam perancangan kontrak. Kontrak itu ibarat penyakit dalam Bapak/Ibu, di tahun pertama mungkin tidak terasa, di tahun kedua masih belum tampak masalah, tetapi kalau dibiarkan, dampaknya bisa muncul dan merugikan di kemudian hari. Karena itu, setiap kontrak harus dirancang dengan cermat sejak awal," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Grace Djalung, S.E., M.M selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda OIKN dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan formal, melainkan wadah strategis untuk meningkatkan kualitas ASN. "Kita sebagai pendukung di dalam pelaksanaan perjalanan pembangunan OIKN memiliki peran yang sangat strategis. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai ASN, sehingga harapannya kontrak yang kita susun memiliki standar tinggi dan memberikan hasil terbaik bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara. " ujarnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara membutuhkan dukungan dari ASN yang tidak hanya memahami teknis pelaksanaan proyek, tetapi juga mampu membangun sistem kerja yang baik dan berorientasi pada hasil. Ia berharap agar kegiatan tidak hanya menjadi ajang sebatas penerimaan materi, namun juga wadah berdiskusi terhadap problem yang seringkali dihadapi di kehidupan sehari-hari.

Kegiatan diselenggarakan secara luring di Ibu Kota Nusantara pada 28 s.d. 31 Oktober 2025 dengan diikuti oleh 11 peserta. Adapun narasumber yang dihadirkan antara lain:

1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgt.
3. Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M.
4 Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb.

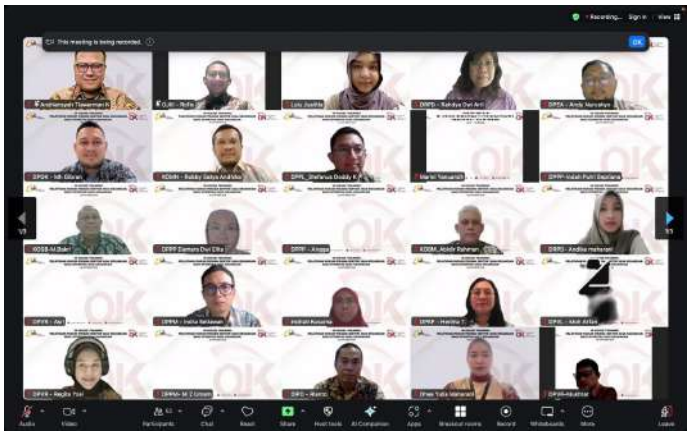
Tidak hanya bersifat teoritis, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi simulasi dan uji sertifikasi yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia (LSP HI). Justitia Training Center berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola kelembagaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang bersikfat aplikatif dan berlandaskan kepastian hukum, serta membuka peluang untuk kerja sama dalam kegiatan-kegiatan serupa lainnya di kemudian hari.



IN HOUSE TRAINING

OKTOBER
29 Oktober 2025

Sinergi Penegakan Hukum Pidana di Sektor Jasa Keuangan Dibahas dalam Pelatihan OJK RI



Mediajustitia.com – Memperkuat kapasitas aparatur dalam memahami dan menegakkan hukum pidana di sektor keuangan secara komprehensif dan berintegritas, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) bekerja sama dengan Justitia Training Center menyelenggarakan Pelatihan Hukum Pidana di Sektor Jasa Keuangan secara luring.

Dalam rangkaian pembukaan kegiatan, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb. (Presiden Direktur Justitia Training Center) mengungkapkan rasa senang bisa kembali memenuhi kebutuhan OJK RI setelah beberapa kali berkolaborasi. Ia menekankan bahwa hukum pidana di sektor jasa keuangan memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Andriansyah juga menyoroti tantangan penegakan hukum di sektor ini, mulai dari konflik norma antarperaturan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, hingga ketidakharmonisan antara regulasi dan implementasinya. "Perbedaan interpretasi antar peraturan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan PP Nomor 5 Tahun 2023 dapat menimbulkan potensi legal gap. Karena itu, pemahaman mengenai batas, koordinasi, dan prosedur kewenangan menjadi sangat penting agar penegakan hukum tetap efektif dan sesuai prinsip due process of law," tambahnya.

Sementara itu, Muhamad Muhidin Rofiul Iksan selaku Deputi Direktur Pengembangan Kompetensi SDM Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dalam sambutannya menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap berbagai isu aktual, seperti konflik norma hukum, kewenangan antara OJK dan Kepolisian, uji materi, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance).



"Perkembangan sektor jasa keuangan yang sangat kompleks menuntut aparat pengawasan memahami hukum pidana bukan hanya sebagai alat penindakan, tapi juga pencegahan agar sistem keuangan kita tetap berintegritas," ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta yang berasal dari berbagai wilayah untuk berbagi pengalaman dan studi kasus nyata yang dihadapi di lapangan.

"Kami berharap peserta tidak hanya menerima ilmu dari narasumber, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertukar pandangan," pungkasnya. Pelatihan yang berlangsung selama satu hari pada 28 Oktober 2025 ini diharapkan dapat memperkuat peran OJK dalam mewujudkan sistem jasa keuangan yang bersih, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menjadi ruang penguatan komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan nasional.



UPCOMING EVENT
NOVEMBER & DESEMBER 2025

Pelatihan dan Sertifikasi

Legislative Drafter X

(Certified Legislative Drafter)

05 s.d. 09 November 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Perancang Kontrak LXVIII

(Certified Contract Drafter)

12 s.d. 15 November 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Mediator LVI

(Certified Mediator)

11 s.d. 16 November 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Auditor Hukum XI

(Certified Legal Auditor)

19 s.d. 23 November 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pejabat/Pengelola Perlindungan Data Pribadi II

(Certified Data Protection Compliance Practitioner)

26 s.d. 31 November 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Analisis Hukum VIII

(Certified Professional Legal Analyst)

03 s.d. 07 Desember 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Perancang Kontrak LXIX

(Certified Contract Drafter)

03 s.d. 06 Desember 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Konsultan Hukum Perpajakan XXXVIII

(Certified Tax Legal Consultant)

10 s.d. 14 Desember 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Arbitrase III

(Certified Arbitration)

09 s.d. 13 Desember 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Likuidator III

(Certified Liquidator)

17 s.d. 20 Desember 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Scan barcode disamping untuk Informasi pelatihan

https://linktr.ee/PelatihanJustitiaTraining

EDUKASI HUKUM

Hukum Pidana Anak dalam Praktik:
Diversi, Rehabilitasi, dan Restorasi

Mediajustitia.com – Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan. Tujuan utama dari diversi adalah untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan dan pemidanaan, serta untuk mendorong penyelesaian yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pemulihan. Diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan kejahatan berat dan ancaman hukumannya tidak lebih dari tujuh tahun penjara. Proses diversi melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua, korban, dan tokoh masyarakat, untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan sosial. Dalam praktiknya, diversi dapat berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, pelayanan sosial, atau bentuk lain yang disepakati bersama. Menurut Pasal 7 UU SPPA, diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara anak, dan apabila tidak tercapai, maka proses hukum dapat dilanjutkan sesuai prosedur peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU SPPA.





Rehabilitasi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi anak setelah berhadapan dengan hukum, baik secara psikologis, sosial, maupun pendidikan. Anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mendapatkan berbagai program yang mendukung pemulihan dan pengembangan diri, seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling, dan kegiatan keagamaan. Rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan individual anak, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang positif dan siap menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks ini, rehabilitasi bukan hanya berfungsi sebagai pemulihan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan penguatan karakter anak. Program rehabilitasi juga mencakup dukungan psikososial yang diberikan oleh tenaga profesional, seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial, yang membantu anak memahami dan mengatasi pengalaman mereka selama berhadapan dengan hukum.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat. Dalam pendekatan ini, anak diajak untuk memahami dampak dari perbuatannya, bertanggung jawab, dan berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Proses restoratif melibatkan dialog antara anak, korban, keluarga, dan pihak lain yang relevan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan dan memperkuat hubungan sosial. Keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui mediasi penal, konsiliasi, atau bentuk lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para pihak. Pendekatan ini memberikan ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri, serta memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan pemulihan yang bermakna. Dalam UU SPPA, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku dan korban, serta pihak lain yang relevan untuk mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan ke keadaan semula, bukan pada pembalasan.

Ketiga pendekatan tersebut, yaitu diversi, rehabilitasi, dan restorasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan. Dengan memahami konsep-konsep ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung anak yang berhadapan dengan hukum, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah anak. Sistem ini juga mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif, anak-anak yang pernah tersandung masalah hukum memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak juga melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pembinaan, dan lembaga perlindungan anak, yang bekerja sama untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hak-hak tersebut mencakup hak atas perlakuan yang adil, hak atas bantuan hukum, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan, dan hak atas privasi. Dalam proses hukum, anak tidak boleh dikenakan perlakuan yang merendahkan martabat, dan harus ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa apabila harus menjalani penahanan. Selain itu, proses pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak, termasuk penggunaan bahasa yang mudah dipahami, suasana yang tidak menakutkan, dan kehadiran pendamping yang dapat memberikan dukungan emosional. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat turut serta dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi anak-anak.

Sistem peradilan pidana anak juga membuka ruang bagi penerapan nilai-nilai lokal dan budaya dalam proses penyelesaian perkara. Di beberapa daerah, pendekatan restoratif dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan mekanisme musyawarah yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Pendekatan ini memperkuat rasa keadilan substantif dan memperkuat ikatan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

MEDIAJUSTITIA
PT. JUSTITIA GLOBAL MANDIRI



DALAM SEMANGAT PERSATUAN,
KITA MENEMUKAN KEBERANIAN
UNTUK BERJUANG.

28 OKTOBER 2025

PRODUCTION TEAM



Fauzan Afif Wibowo

Head of Production



Samuel Arthur Ferber

Videographer & Editor



Handoko Sigit

IT Developer & Editor



Talitha Reina Alfira

Content Creator



Dimas Yulianto

Social Media Officer



Abdurrahman Ma'ruf

Graphic Designer

CALL FOR ARTICLE BATCH XXVI

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch XXVI" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. Margin (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



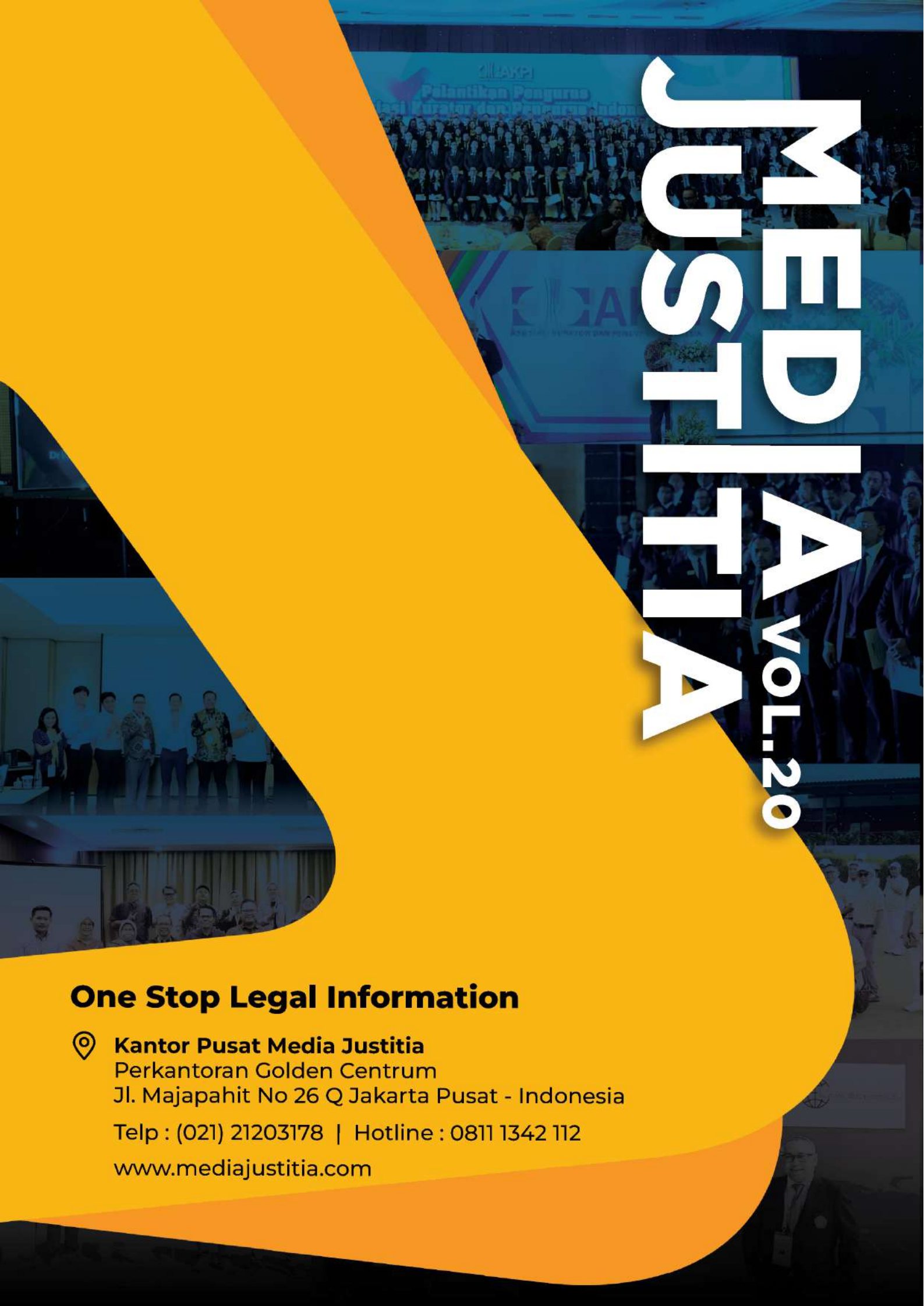
Segera kirimkan tulisanmu sebelum 30 Desember 2025 melalui

medjustitia@gmail.com

Contact Us For More!

Dimas Yulianto
+62 811-1492-283

Fauzan Afif
+62 811-1342-112



MEDIA JUSTITIA

VOL. 20

One Stop Legal Information

Kantor Pusat Media Justitia
Perkantoran Golden Centrum
Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia

Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112

www.mediajustitia.com